

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pgp)**

Oleh :

Dhiya Nabila Kusworo

E1A018137

ABSTRAK

Perselisihan antar para pihak alih daya sering kali terjadi akibat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban antar para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya serta implikasi peralihan PKWT menjadi PKWTT pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pgp.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dan peraturan perundang – undangan. Data diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada dasarnya telah menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya. Peralihan PKWT menjadi PKWTT melahirkan implikasi terhadap pihak – pihak yang terkait. Bagi pekerja implikasi nya yaitu batal demi hukum maka PKWT menjadi PKWTT. Sedangkan bagi pengusaha, implikasi nya pengusaha harus membayarkan hak – hak normatif pekerja alih daya sesuai dengan Pasal 81 angka 44 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Alih Daya, Implikasi

**LEGAL PROTECTION OF OUTSOURCING WORKERS ACCORDING TO
LAW NUMBER 11 YEAR 2020 ON JOB CREATION**

(Juridical Review Of Decision Number 40 / Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pgp)

Arranged by:

Dhiya Nabila Kusworo

E1A018137

ABSTRACT

Disputes between outsourcing parties often occur due to implementation that is not in accordance with applicable laws and regulations, causing non – fulfillment of rights and obligations between the parties. This study aims to analyze the legal protection of outsourcing workers as well as the implications of the transition of specific time work agreement into indefinite work agreement in the decision of the Pangkal Pinang District Court Number 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pgp.

The research method used is normative juridical with descriptive-analytical research specifications. The data used are secondary data sourced from library studies and legislation. Data were processed and analyzed by qualitative normative methods.

The results showed that Law Number 11 year 2020 on Job Creation has basically guaranteed legal protection for outsourced workers. The transition of specific time work agreement into indefinite work agreement has implications for related parties. For workers, the implication is null and void, so specific time work agreement become indefinite work agreement . As for employers, the implication is that employers must pay the normative rights of outsourcing workers in accordance with Article 81 number 44 of Law Number 11 year 2020 concerning job.

Keywords: *Legal Protection, Outsourcing, Implications*